

Latar Belakang

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan.

Pada masa itu desa merupakan kesatuan masyarakat kecil, seperti sebuah rumah tangga besar yang di pimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pada masa itu masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan terpencil dan pedalaman.¹

Ketika pemerintah semakin gencar dengan kebijakan pertumbuhan (growth), khususnya pada masa orde baru, banyak kalangan akademisi dan praktisi pembangunan menilai bahwa nilai-nilai lokal yang tumbuh di desa sejak lama dapat di jadikan pertimbangan dalam membangun demokrasi dan kemandirian masyarakat. Terlebih tuntutan reformasi untuk membangun *good governance* dan penguatan otonomi desa perlu diaktualisasikan kembali nilai-nilai sosial yang telah terbangun di desa serta keterlibatan masyarakat secara penuh dalam pengambilan keputusan di tingkat desa hingga kebijakan nasional.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan indikasi bahwa daerah-daerah yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengurus, mengatur, dan mengembangkan daerahnya sesuai

¹ Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*, Read (Reinforcement Action and Development), 2011. Hal. 1

dengan potensi yang dimiliki, maka pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, partisipasi ini dititik beratkan baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian pembangunan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia sekarang ini, adalah pembangunan yang dicita-citakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Dimana desa dijadikan sebagai titik sentral pembangunan nasional karena kawasan pedesaan merupakan bagian integral negara Republik Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1).

Kepemimpinan yang baik akan memberikan inspirasi dan semangat atas adanya suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada bawahannya sehingga seorang kepala desa di dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan akan memudahkan pencapaian tujuan. Desa dengan demikian tidak boleh merupakan kepanjangan dengan kepentingan penguasa. Ini mengakibatkan ketika desa harus mewujudkan peranannya dalam membangun demokrasi dan mengimplementasikan otonominya dimasa “Reformasi” (masa Undang-undang No. 32 Tahun 2004). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini bukan merupakan lembaga kontrol melainkan sebagai

lembaga kerja sama yang mengerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipasif dan berkelanjutan.

Sistem struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis dan peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat, maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga dijelaskan pasal-pasal mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden RI No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD yang ada ada sampai saat ini.

LPMD dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPMD didideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2001 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Menurut *Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (8)* ditegaskan bahwa, “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.² Bab IX Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan mekanisme seperti ini, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa seharusnya bersifat bottom up. Dengan mekanisme seperti ini, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa seharusnya bersifat bottom up. Akan tetapi selama ini, baik perencanaan maupun implementasi pembangunan desa selalu bersifat top down, dimana desa hanya menerima program program pembangunan desa dari pemerintah. Berdasarkan mekanisme perundang undangan yang ada, seharusnya desa memiliki grand design pembangunan sendiri (inisiatif desa), jika desa memiliki grand design dalam pembangunan desanya, maka desa dimungkinkan hanya akan mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. sedangkan inisiatif untuk melakukan dan melaksanakan pembangunan (Program-program) datang dari inisiatif desa sendiri.

² UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 8 dan pasal 78 ayat 1,2,3

Dengan kenyataan bahwa $\pm 70\%$ masyarakat Pakatto di desa dengan keadaan dan kondisi senyatanya saat ini masih termasuk dalam keadaan “tertinggal” pada hampir di segala bidang, maka upaya pembangunan pedesaan terpadu merupakan langkah penting yang harus dilakukan dan di tingkatkan dengan cermat dan efektif. Hal ini terkait pula dengan tuntutan dan kebutuhan yang tidak dapat di hindarkan bahwa seluruh bangsa Indonesia mau tidak mau dan mampu tidak mampu harus menghadapi era globalisasi, era komunikasi, informasi dan teknologi yang melanda dunia termasuk Indonesia dengan pelaksanaannya yang semakin meningkat dan canggih.

Lebih lanjut, dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh desa kepada pemerintah, terdapat klasifikasi program pembangunan desa, misalnya untuk pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, desa dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya untuk membangun sekolah, pasar desa, listrik, air, dan sebagainya.

Secara umum kondisi tersebut dapat dikatakan telah mencapai tahap kejenuhan, Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, upaya yang perlu dilakukan tidak lagi semata mata mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga diimbangi dengan kebijakan mikro berupa terobosan yang secara langsung memberikan pengaruh pada peningkatan produktivitas golongan miskin tersebut, utamanya dengan peningkatan pembangunan desa yang terintegrasi (Tjiptoherijanto, 1997: 57).

Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus merubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan merubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang

menunjang keperluan pertanian, serta mengarahkannya secara lebih terpadu, sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota atau daerah pedesaan secara menyatu, sebab masyarakat di desa Pakatto tersebut masih kurang pemahaman tentang mekanisme peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam penyusunan pembangunan pedesaan yang lebih unggul. Adapun terdapat isu strategis yang mengacu pada isu kabupaten yang tak lepas dari setiap peranannya antara lain : Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam pembangunan pedesaan terpadu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **“Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu (Studi di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)”**.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada kajian mengenai Peranan LPMD Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto telah mengatasi permasalahan dengan baik, LPMD selaku perangkat desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi

masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.

2. Faktor-faktor menjadi penghambat dan pendorong dari peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu :

- a. Faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu kualitas sumber daya manusia dan rendahnya swadaya masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu sehingga kesadaran masyarakat Pakatto dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya menjadi berkurang.
- b. Faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu sumber daya aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sumber dana sudah terkontrol dengan baik oleh LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.